



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1061/KPTS/M/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 984/KPTS/M/2018 TENTANG BESARAN
TUNJANGAN KINERJA, NAMA DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poliklinik Pekerjaan Umum, serta dengan terbitnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan nama jabatan;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu merubah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 984/KPTS/M/2018 Tentang Besaran Tunjangan Kinerja, Nama Dan Kelas Jabatan Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 984/KPTS/M/2018 Tentang Besaran Tunjangan Kinerja, Nama Dan

Kelas Jabatan Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 249);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.02/2015 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1580);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108);
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 984/KPTS/M/2018 Tentang Besaran Tunjangan Kinerja, Nama Dan Kelas Jabatan Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 984/KPTS/M/2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KINERJA, NAMA DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 984/KPTS/M/2018 Tentang Besaran Tunjangan Kinerja, Nama Dan Kelas Jabatan Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pejabat dan Pegawai yang terdiri atas:

- a. Politeknik PU:
 1. Direktur Politeknik PU
 2. Wakil Direktur Politeknik PU
 3. Kepala Bagian Politeknik PU
 4. Kepala Subbagian Politeknik PU
 5. Dosen
 6. Calon Dosen
 7. Analis Pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan
 8. Teknisi Laboratorium
 9. Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran
 - b. Kepala Balai Kelas I:
 1. Balai Prasarana Permukiman
 2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
 - c. Kepala Balai Kelas II:
 1. Balai Prasarana Permukiman
 2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
- mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

KETIGA : Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Wakil Menteri mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober Tahun 2019

KEEMPAT : Nama Jabatan pelaksana sebelumnya tetap dapat digunakan di dalam dokumen pengelolaan kepegawaian, penggajian, dan dokumen administrasi lainnya sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

<http://jdih.pu.go.id>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1061/KPTS/M/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 984/KPTS/M/2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KINERJA, NAMA DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAFTAR BESARAN TUNJANGAN KINERJA, NAMA DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
I	JABATAN STRUKTURAL		
	A MENTERI	-	49.860.000
	B WAKIL MENTERI	-	44.874.000
	C JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA		
	1 Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal	17	33.240.000
	2 Direktur Jenderal		32.095.067
	3 Kepala Badan		31.393.333
	4 Staf Ahli Menteri PUPR	16	27.577.500
	D JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
	1 Sekretaris Direktorat Jenderal	15	19.280.000
	2 Kepala Biro		
	3 Inspektur		
	4 Direktur Politeknik PU		18.239.318
	5 Sekretaris Inspektorat Jenderal		
	6 Direktur		
	7 Kepala Pusat di Direktorat Jenderal/Sekretariat Jenderal		
	8 Sekretaris Badan	17.664.205	
	9 Kepala Pusat di Badan	17.390.341	
	10 Sekretaris Lembaga Non Struktural	14	17.064.000
	11 Kepala Balai Besar		
	12 Wakil Direktur Politeknik PU		
	13 Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI		15.262.042
	E JABATAN ADMINISTRATOR		
	1 Kepala Balai Wilayah Sungai	13	10.936.000
	2 Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional		
	3 Kepala Balai Bendungan		
	4 Kepala Sub Direktorat		
	5 Kepala Bagian Unit Organik		
	6 Kepala Bidang Unit Organik		
	7 Kepala Balai Kelas I : a. Balai Prasarana Permukiman b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi	12	9.896.000
	8 Kepala Bagian Politeknik PU		
	9 Kepala Balai	11	8.757.600
	10 Kepala Balai Kelas II : a. Balai Prasarana Permukiman b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi		
	11 Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis/ Balai Besar		
	12 Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis/ Balai Besar		
	13 Kepala Bagian Setwan KORPRI		
	F JABATAN PENGAWAS		
	1 Kepala Seksi Unit Organik	9	5.079.200
	2 Kepala Sub Bagian Unit Organik		
	3 Kepala Sub Bidang Unit Organik		
	4 Kepala Loka		
	5 Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis		
	6 Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
II	JABATAN FUNGSIONAL		
	A BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1 Teknik Pengairan	5 - 13	
	2 Teknik Jalan dan Jembatan	5 - 13	
	3 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	5 - 13	
	4 Teknik Penyehatan Lingkungan	5 - 13	
	5 Penata Ruang	5 - 13	
	6 Pembina Jasa Konstruksi	8 - 14	
	B BIDANG LAINNYA		
	7 Widyaiswara	8 - 13	
	8 Auditor	6 - 13	
	9 Peneliti	8 - 13	
	10 Perekayasa	8 - 13	
	11 Perencana	8 - 13	
	12 Dokter	8 - 9	
	13 Teknisi Litkayasa	5 - 8	
	14 Pengendali Dampak Lingkungan	8 - 11	
	15 Instruktur	6 - 11	
	16 Pranata Humas	6 - 11	
	17 Pustakawan	6 - 11	
	18 Analis Kepegawaian	8 - 11	
	19 Auditor Kepegawaian	8 - 11	
	20 Perancang Peraturan Per-UU-an	8 - 11	
	21 Pranata Komputer	6 - 11	
	22 Surveyor Pemetaan	6 - 11	
	23 Arsiparis	6 - 11	
	24 Dokter Gigi	8 - 9	
	25 Pranata Laboratorium Kesehatan	5 - 8	
	26 Perawat Gigi	5 - 8	
	27 Perawat	5 - 8	
	28 Bidan	5 - 8	
	29 Radiografer	5 - 8	
	30 Apoteker	8 - 9	
	31 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8 - 9	
	32 Dosen	9 - 15	
	33 Analis Anggaran	8 - 13	
	34 Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	8 - 13	
	35 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	8 - 11	
	36 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	6 - 8	
	37 Penata Laksana Barang	6 - 8	
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL		
	1 Pejabat Fungsional Ahli Utama	13	10.936.000
	2 Pejabat Fungsional Ahli Madya	11	8.757.600
	3 Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	5.079.200
	4 Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
	5 Pejabat Fungsional Penyelia		
	6 Pejabat Fungsional Mahir	7	3.915.950
	7 Pejabat Fungsional Terampil	6	3.510.400
	8 Pejabat Fungsional Pemula	5	3.134.250
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI		
	1 Pejabat Fungsional Ahli Utama	14	15.262.042
	2 Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	9.896.000
	3 Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	5.979.200
	4 Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL DOSEN		
	1 Guru Besar	15	19.280.000
	2 Lektor Kepala	13	10.936.000
	3 Lektor	11	8.757.600
	4 Asisten Ahli	9	5.079.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)		
III	JABATAN PELAKSANA				
	A JABATAN UTAMA				
	1 Analis Investasi dan Pasar Konstruksi	7	3.915.950		
	2 Analis Jalan Jembatan				
	3 Analis Pembiayaan				
	4 Analis Pemetaan				
	5 Analis Penyediaan Perumahan				
	6 Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan				
	7 Analis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan				
	8 Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman				
	9 Penelaah Kebijakan				
	10 Penelaah Kompetensi Jasa Konstruksi				
	11 Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik				
	12 Penelaah Leger Jalan				
	13 Penelaah Manajemen Mutu				
	14 Penelaah Mutu Konstruksi				
	15 Penelaah Pemberdayaan Masyarakat				
	16 Penelaah Pengadaan Tanah				
	17 Penelaah Pengelolaan Sumber Daya Air				
	18 Penelaah Pengembangan Keahlian				
	19 Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman				
	20 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan				
	21 Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			6	3.510.400
	22 Penata Bangunan Gedung dan Permukiman				
	23 Penata Pemberdayaan Masyarakat				
	24 Penata Pengelolaan Sumber Daya Air				
	25 Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman				
	26 Penata Sarana Kelitbangan				
	27 Pengolah Bahan Standar dan Pedoman				
	28 Juru Operasi dan Pemeliharaan	5	3.134.250		
	29 Operator Alat Berat				
	30 Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air				
	31 Petugas Operasi dan Pemeliharaan				
	B JABATAN PENUNJANG				
	32 Ajudan Menteri	7	3.915.950		
	33 Analis Karir dan Kompetensi				
	34 Analis Kinerja Pegawai				
	35 Analis Organisasi				
	36 Analis Tata Laksana				
	37 Analis Perencanaan				
	38 Analis Sistem Informasi Manajemen				
	39 Analis Statistik				
	40 Analis Teknik dan Materi				
	41 Penelaah Advokasi Hukum				
	42 Penelaah BMN				
	43 Penelaah Kepegawaian				
	44 Penelaah Kerjasama				
	45 Penelaah Keuangan				
	46 Penelaah Pelayanan Informasi Publik				
	47 Penelaah Pengadaan Barang Jasa				
	48 Penelaah Peraturan Perundang-undangan				
	49 Penelaah Publikasi				
	50 Penelaah Tata Naskah Dinas				
	51 Penyusun Monev dan Pelaporan				
	52 Penyusun Pelaporan Pimpinan				
	53 Penyusun Program dan Rencana Anggaran				
	54 Perencana Jaringan Utilitas				
	55 Programmer				
	56 Teknisi				
	57 Analis Pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan				

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
	58 Penata Asesment Center	6	3.510.400
	59 Penata Asrama		
	60 Penata Bahan Pustaka		
	61 Penata BMN		
	62 Penata Diklat		
	63 Penata Kepegawaian		
	64 Penata Keuangan		
	65 Penata Urusan Keprotokolan		
	66 Pengolah Bahan Dokumentasi		
	67 Pengolah Data dan Informasi		
	68 Pengolah Monev dan Pelaporan		
	69 Pengolah Program dan Rencana Anggaran		
	70 Penyusun Bahan Publikasi		
	71 Sekretaris		
	72 Teknisi Laboratorium	5	3.134.250
	73 Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran		
	74 Mekanik		
	75 Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP		
	76 Pengadministrasi Umum		
	77 Pengatur Sarana Kantor		
	78 Penilik Jalan		
	79 Petugas Asrama		
	80 Komandan Satpam		
	81 Pengemudi Menteri		
	82 Petugas Obat		
	83 Caraka	3	2.898.000
	84 Pengemudi		
	85 Satpam		
	86 Pramubakti	1	2.531.250
IV	JABATAN LAINNYA (KESATKERAN** DAN LAINNYA)		
	STAF KHUSUS, TENAGA AHLI DAN STRATEGIS LAINNYA		
	1 Staf Khusus Menteri	16	27.577.500
	2 Tenaga Ahli Menteri	13	10.936.000
	3 Sekretaris PMU	9	5.079.200
	JABATAN KESATKERAN		
	1 Kepala Satuan Kerja Mandiri	11	8.757.600
	2 Pejabat Pembuat Komitmen Mandiri	9	5.079.200
	3 Pejabat Penguji SPM	7	3.915.950
	4 Pelaksana Teknik		
	5 Bendahara		
	6 Penata Teknik	6	3.510.400
	7 Petugas Teknik	5	3.134.250
	JABATAN CALON		
	1 Calon Dosen	7	3.915.950
	2 CPNS Golongan III		
	3 CPNS Golongan II		
	KARYASISWA		
	1 Karyasiswa Master dan Doktoral	7	3.915.950
	2 Karyasiswa Ahli Madya dan Sarjana	6	3.510.400
	**) Untuk Jabatan Pelaksana Penunjang seperti Penelaah Keuangan, Penata Keuangan, Penelaah BMN, Penata BMN, Pengadministrasi Umum, dan lainnya dapat digunakan juga pada Jabatan Kesatkeran		

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 1061/KPTS/M/2019
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 984/KPTS/M/2018
 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KINERJA, NAMA DAN
 KELAS JABATAN PEGAWAI DI KEMENETRIAN PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KONVERSI NAMA JABATAN SESUAI DENGAN
 PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 41 TAHUN 2018

NAMA JABATAN (Kepmen PUPR Nomor 984 Tahun 2018)		NAMA JABATAN (Permen PAN RB Nomor 41 Tahun 2018)
JABATAN FUNSIONAL UMUM		
A JABATAN UTAMA		
1	Analisis Investasi dan Pasar Konstruksi	Analisis Investasi Pemerintah
2	Analisis Jalan Jembatan	Analisis Jalan Jembatan
3	Analisis Pembiayaan	Analisis Strategi Pembiayaan
4	Analisis Pemetaan	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan
5	Analisis Penyediaan Perumahan	Analisis Perumahan
6	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan
7	Analisis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan	Analisis Strategi Pembiayaan
8	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman
9	Penelaah Kebijakan	Analisis Pengembangan Infrastruktur
10	Penelaah Kompetensi Jasa Konstruksi	Analisis Kompetensi
11	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik
12	Penelaah Leger Jalan	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan
13	Penelaah Manajemen Mutu	Analisis Penjamin Mutu
14	Penelaah Mutu Konstruksi	Penelaah Mutu Konstruksi
15	Penelaah Pemberdayaan Masyarakat	Analisis Pemberdayaan Masyarakat
16	Penelaah Pengadaan Tanah	Pengelola Pengadaan Tanah
17	Penelaah Pengelolaan Sumber Daya Air	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air
18	Penelaah Pengembangan Keahlian	Analisis Pengembangan Kompetensi
19	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman
20	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
21	-	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
22	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman
23	Penata Pemberdayaan Masyarakat	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
24	Penata Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelola Sumber Daya Air
25	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman
26	Penata Sarana Kelitbangan	Pengelola Pemeliharaan Laboratorium
27	Pengolah Bahan Standar dan Pedoman	DIHAPUS
28	Operator Alat Berat	Operator Alat Berat
29	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air
30	-	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

NAMA JABATAN (Kepmen PUPR Nomor 984 Tahun 2018)		NAMA JABATAN (Permen PAN RB Nomor 41 Tahun 2018)	
B JABATAN PENUNJANG			
31	Ajudan Menteri	Ajudan	
32	Analisis Karir dan Kompetensi	Analisis Pengembangan Karir Analisis Kompetensi	
33	Analisis Kinerja Pegawai	Analisis Kinerja	
34	Analisis Organisasi	Analisis Organisasi	
35	Analisis Tata Laksana	Analisis Tata Laksana	
36	Analisis Perencanaan	Analisis Perencanaan	
37	Analisis Sistem Informasi Manajemen	Analisis Sistem Informasi	
38	Analisis Statistik	Analisis Statistik	
39	Analisis Teknik dan Materi	Analisis Teknik dan Materi	
40	Penelaah Advokasi Hukum	Analisis Advokasi Hukum	
41	Penelaah BMN	Analisis Barang Milik Negara	
42	Penelaah Kepegawaian	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
43	Penelaah Kerjasama	Analisis Kerja Sama	
44	Penelaah Keuangan	Analisis Keuangan	
45	Penelaah Pelayanan Informasi Publik	Analisis Humas	
46	Penelaah Pengadaan Barang Jasa	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	
47	Penelaah Peraturan Perundang-undangan	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	
48	Penelaah Publikasi	Analisis Publikasi	
49	Penelaah Tata Naskah Dinas	Pengelola Tata Naskah	
50	Penyusun Monev dan Pelaporan	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
51	Penyusun Pelaporan Pimpinan	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	
52	Penyusun Program dan Rencana Anggaran	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
53	Perencana Jaringan Utilitas	Pengawas Jaringan Utilitas	
54	Programmer	Analisis Sistem Informasi	
55	Teknisi	Teknisi Sarana dan Prasarana	
56	-	Calon Dosen	
57	-	Analisis Pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan	
58	Juru Operasi dan Pemeliharaan	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
59	Penata Asesment Center	Pengelola Administrasi Tempat Uji Kompetensi	
60	Penata Asrama	Pengelola Asrama	
61	Penata Bahan Pustaka	Pengelola Bahan Pustaka	
62	Penata BMN	Pengelola Barang Milik Negara	
63	Penata Diklat	Pranata Diklat	
64	Penata Kepegawaian	Pengelola Kepegawaian	
65	Penata Keuangan	Pengelola Keuangan	
66	Penata Urusan Keprotokolan	Analisis Protokol	
67	Pengolah Bahan Dokumentasi	Pengelola Dokumentasi	
68	Pengolah Data dan Informasi	Pengelola Data	
69	Pengolah Monev dan Pelaporan	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	
70	Pengolah Program dan Rencana Anggaran	Pengelola Anggaran	

NAMA JABATAN (Kepmen PUPR Nomor 984 Tahun 2018)		NAMA JABATAN (Permen PAN RB Nomor 41 Tahun 2018)	
71	Penyusun Bahan Publikasi	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	
72	Sekretaris	Sekretaris	
73	-	Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran	
74	Teknisi Laboratorium	DIHAPUS	
75	Mekanik	Teknisi Mesin	
76	Pelaksana Urusan Kerumahtanggan TUP	Pengelola Rumah Tangga	
77	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	
78	Pengatur Sarana Kantor	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	
79	Penilik Jalan	Penilik Jalan	
80	Petugas Asrama	Penjaga Asrama	
81	Komandan Satpam	Komandan Petugas Keamanan	
82	Pengemudi Menteri	Pengemudi VIP	
83	Petugas Obat	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	
84	Caraka	DIHAPUS	
85	Pengemudi	Pengemudi	
86	Satpam	Petugas Keamanan	
87	Pramubakti	Pramu Bakti	

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO